



Media: Radar

Hari: Kamis

Tanggal: 05 Januari 2017

Halaman: 7

Pelaksana Tugas Setahun, Tidak Logis

JOGJA - Tujuh jabatan eselon II di lingkungan Pemkot Jogja yang akan diisi Pelaksana Tugas (Plt) selama setahun lebih, dinilai tak logis oleh anggota dewan. "Tak logis," tandas anggota Komisi A DPRD Kota Jogja Sigit Wicaksono, kemarin (4/1).

Untuk itu, dia meminta Penjabat Wali Kota Jogja segera melakukan konsultasi ke Kemendagri, terkait kewenangan penjabat melakukan lelang jabatan.

"Setahun lebih seseorang harus membagi waktu kerja sebagai pejabat definitif dan Plt, sangat tidak efektif dalam memimpin," ujar Sigit.

Dikhawatirkan jika terlalu lama membagi tugas, fungsi layanan ke masyarakat tidak bisa berjalan dengan baik. Menurut dia, harusnya tugas seorang Plt harus dibatasi dan segera diisi pejabat definitif.

Jika untuk mengisi pejabat eselon II harus melalui mekanisme lelang

jabatan, Sigit meminta segera digelar proses lelang jabatan. "Kalau harus dengan lelang jabatan, ya segera saja dibentuk tim pansel dan membuka proses lelang," pintanya.

Terkait dengan posisi Penjabat Wali Kota Jogja Sulistiyo yang tidak boleh melakukan rotasi pegawai tanpa seizin Kemendagri, Sigit meminta supaya penjabat wali kota segera berkonsultasi. "Kalau harus seizin Kemendagri, ya segera minta izin," harapnya.

Politikus Nasdem tersebut berharap proses pengisian tujuh jabatan eselon II Pemkot Jogja tidak perlu harus menunggu hingga pelantikan wali kota definitif. Sebab, selain membutuhkan waktu yang lebih lama, wali kota definitif baru boleh melakukan rotasi enam bulan pascadilantik. Hal itu untuk menghindari unsur politis dalam penempatan pejabat.

Sebelumnya, Penjabat Wali Kota Jogja Sulistiyo usai mengukuhkan

pejabat eselon II, II, dan IV di Balai Kota Jogja, Selasa (3/1), mengatakan, segera melakukan komunikasi dengan Kemendagri untuk pengisian tujuh jabatan eselon II. Dikatakan, untuk pengisian jabatan eselon II dilakukan dengan lelang terbuka, sesuai dengan UU nomor 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Seperti diketahui, pascapengukuhan organisasi perangkat daerah (OPD) sesuai dengan PP nomor 18/2016,

masih ada tujuh OPD yang belum memiliki kepala.

Tujuh jabatan eselon II tersebut adalah Asisten Pemerintahan, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Perlindungan Perempuan. Juga Sekretaris DPRD Kota Jogja serta Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Jogja. (pra/lla/nn)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. BKPP	Netral	Segera	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 31 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005